

## Peran *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE) pada Konflik Transnistria

**Muhammad Labib Ramadhani\*<sup>1</sup> Arie Kusuma Paksi<sup>2</sup>, Andini Hayu Agus Putri<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
 Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

e-mail: \*<sup>1</sup>[muhammad.labib.fisip17@mail.umy.ac.id](mailto:muhammad.labib.fisip17@mail.umy.ac.id), <sup>2</sup> [ariekusumapaksi@umy.ac.id](mailto:ariekusumapaksi@umy.ac.id) ,  
<sup>3</sup> [andini.hayu.isip19@mail.umy.ac.id](mailto:andini.hayu.isip19@mail.umy.ac.id)

### **Abstract**

*This paper attempts to explain what efforts have been made by the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) to deal with the conflicts that occurred in Transnistria. OSCE is an intergovernmental cooperation organization in the field of defense and security. Transnistria is a region in Moldova. The history of this conflict occurred at a time of weakening influence until the collapse of the power of the Soviet Union. Which after Moldova's independence there was a group that declared independence from Moldova and made the name of a new country with the name Pridnestrovian Moldavian Soviet Socialist Republic or Transnistria. One of the triggers for this conflict is linguistic and cultural differences, where most Moldovan people are close to Romania while Transnistria is close to Slavic. In this research, the method used was qualitative which focused on library research techniques. This conflict caused many casualties, as well as ethnic and national sentiments from various groups. For this reason, OSCE, as the organization's defense and security organization, helps this conflict by carrying out several functions such as the Information function, regulatory function, and operational function.*

**Keywords** — OSCE, Conflict, Moldova, Transnistria

### **Abstrak**

Karya tulis ini berusaha menjelaskan tentang upaya apa saja yang dilakukan oleh *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE) untuk menangani konflik yang terjadi di Transnistria. OSCE merupakan sebuah organisasi kerjasama antar-pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan. Transnistria adalah sebuah wilayah di Moldova. Sejarah konflik ini terjadi dimulai pada saat melemahnya pengaruh sampai runtuhnya kekuasaan Uni Soviet. Yang mana setelah Moldova merdeka terdapat kelompok yang menyatakan kemerdekaan dari Moldova dan membuat nama negara baru dengan nama Pridnestrovian Moldavian Soviet Socialist Republic atau Transnistria. Salah satu pemicu dari konflik ini adalah perbedaan bahasa dan budaya, yang mana mayoritas masyarakat Moldova dekat dengan Rumania sedangkan Transnistria dekat dengan Slavic. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif yang berfokus pada teknik *library research*. Konflik ini menimbulkan banyak korban jiwa, serta sentimen yang bersifat etnis dan kebangsaan dari berbagai macam kalangan. Untuk itu OSCE sebagai organisasi dibidang pertahanan dan keamanan, membantu konflik ini dengan menjalankan beberapa fungsi seperti fungsi Informasi, fungsi pembuat peraturan dan fungsi operasional.

**Kata kunci** — Konflik, Moldova, OSCE, Transnistria

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Di dalam tatanan hubungan internasional, permasalahan maupun konflik mengenai sengketa wilayah, pemberontakan, hingga gerakan separatisme bukanlah hal yang baru. Permasalahan ini seolah selalu muncul dari generasi ke generasi sehingga membutuhkan banyak upaya untuk menyelesaikannya. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan sebuah organisasi internasional. Organisasi ini nantinya terdiri dari beragam negara yang akan saling melakukan kerjasama untuk mencapai kepentingan nasional dan tujuan bersama.

Salah satu konflik yang membutuhkan penyelesaian melalui organisasi internasional adalah konflik di Transnistria. Dalam konflik tersebut, organisasi internasional bersama *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE) memiliki peranan untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi. Peranan dari OSCE inilah yang menarik untuk dibahas. OSCE sendiri di dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. OSCE merupakan sebuah organisasi kerjasama antar-pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan terbesar di dunia. Berdasarkan sumber yang didapatkan dalam website resmi, OSCE beranggotakan 57 negara dari berbagai kawasan, seperti kawasan seperti Amerika Utara, Asia, dan Eropa. Kehadiran OSCE bertujuan untuk membangun dialog antar negara-negara yang tengah berkonflik, baik konflik internal maupun internasional. OSCE juga memiliki tujuan untuk mewujudkan

stability, peace, dan democracy bagi negara-negara anggotanya (OSCE, 2020). OSCE juga turut berperan menyelesaikan persoalan yang berakitan dengan kontrol senjata, kontra-terorisme, hak asasi manusia, minoritas, separatisme, dan berbagai macam permasalahan yang terkait dengan ekonomi dan lingkungan hidup.

OSCE dibangun di tahun 1973 yang pada awalnya bernama *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE). Konferensi ini mulanya bertujuan untuk membahas dan menegosiasikan mengenai perang dingin yang terjadi pada masa itu. Adanya dialog pada konferensi ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi blok barat dan blok timur untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan yang terjadi di masa itu. Konferensi ini telah digelar sebanyak dua kali. Pertama adalah Konferensi Helsinki 3 Juli 1973 dan kedua adalah Konferensi Jenewa 18 September 1973. Hasil dari konferensi yang telah dilakukan adalah Pacya Helsinki yang ditandatangani oleh 35 Negara anggota konferensi. Pacta Helsinki berisi mengenai perjanjian dan kesepahaman bersama dalam ranah politik-militer, ekonomi-lingkungan hidup, dan permasalahan hak asasi manusia, yang nantinya dikenal dengan nama "Helsinki process" (Galbreath, 2007).

Setelah runtuhnya Uni Soviet yang sekaligus menandai berakhirnya perang dingin, CSCE semakin memperluas pengaruh dan komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan dan konflik yang terjadi di kawasan Eropa, khususnya berkaitan dengan permasalahan baru yang timbul setelah berakhirnya Perang Dingin di Eropa. Berdasarkan pada peningkatan komitmen ini, pada tahun 1994, tepatnya pada KTT yang dilaksanakan di Kota Budapest, Hungary, *Conference on Security and Cooperation in Europe*

(CSCE) yang tadinya hanya berupa ‘konferensi’ berubah menjadi sebuah ‘organisasi’ independent, yang selanjutnya diberi nama Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) (OSCE, 2020).

Setelah berubah menjadi organisasi independent, OSCE kemudian memperluas ranah dan jangkauan kegiatan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya seperti memperkuat kerangka normatif untuk keamanan Eurasia, mempromosikan pembangunan demokrasi untuk pencegahan konflik, aktif dalam pencegahan konflik di daerah rawan konflik, dan menjadi penengah dalam konflik yang sedang berlangsung, serta turut menjadi fasilitator resolusi konflik dan pembangunan pasca konflik. OSCE sampai dengan saat ini telah memiliki lebih dari 3,460 karyawan, yang mana sebagian dari mereka bekerja secara langsung di lapangan, dengan hanya 10% dari mereka yang bekerja di Kantor Pusat, Vienna (OSCE, 2020).

Salah satu konflik yang cukup terkenal yang ditangani oleh OSCE ialah konflik yang terjadi di Transnistria, Moldova. OSCE telah terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut sejak tahun 1992 ketika masih bernama CSCE. Sejarah dari konflik ini bermula ketika pengaruh Uni Soviet semakin melemah pasca keruntuhannya di tahun 1990-an. Saat itu, negara-negara satellite yang dimiliki Uni Soviet mulai menyatakan kemerdekaannya masing-masing. Meskipun mereka menyatakan kemerdekaan, hal ini tidak membuat negara-negara tersebut terbebas dari masalah kedaulatan. Contoh negara yang mengalami permasalahan mengenai kedaulatannya adalah Moldova. Negara ini sejak awal kemerdekaannya mengalami konflik kedaulatan yang disebabkan oleh sekelompok golongan yang menyatakan

klaim atas sebagian wilayah negaranya, khususnya wilayah yang memiliki perbatasan langsung dengan Ukraina. Golongan orang-orang di wilayah tersebut menyatakan kemerdekaannya dari Moldova dan berkeinginan untuk mendirikan sebuah negara baru. Negara ini diberi nama *Pridnestrovian Moldavian Soviet Socialist Republic* atau nantinya lebih dikenal dengan nama Transnistria (Gonta, 2014).

Permasalahan ini terjadi karena adanya berbagai hal dan faktor yang melatarbelakanginya. Jika dilihat dari sisi etnis, masyarakat Moldova mayoritasnya adalah etnis moldova yang cenderung memiliki kedekatan dengan orang-orang Rumania, seperti dari segi bahasa dan budaya. Sementara itu, wilayah Transnistria merupakan sebuah wilayah yang jika dilihat dari segi etnis memiliki bahasa dan budaya yang berbeda, dimana Transnistria diisi oleh orang-orang Slavic yang sebagian besarnya memiliki budaya dan bahasa seperti orang-orang Rusia dan Ukraina. Perbedaan etnis inilah yang kemudian menjadi penyebab kedua wilayah seringkali berkonflik satu sama lain. Hal ini dikarenakan orang-orang Transnistria merasa bahwa mereka sejak awal adalah kelompok masyarakat yang ‘berbeda’, dan tidak bisa disatukan dengan orang-orang Moldova (Minority Rights Group International, 2007).

Tidak hanya dari segi etnis, permasalahan ini juga dapat dilihat dari sisi historis dengan berbagai macam timeline. Salah satu timeline tersebut ketika wilayah Transnistria maupun Moldova masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Pada masa itu, wilayah Moldova merupakan bekas wilayah Rumania, yang pada masa pasca Perang Dunia I bernama Bessarabia. Wilayah Bessarabia diberikan kepada Uni Soviet pada tahun 1940, ketika Rumania dianeksasi oleh Uni Soviet pasca Perang

Dunia I. Selain itu, wilayah Transnistria masa kini sebelumnya adalah bagian dari wilayah Ukraina, yang mana selanjutnya wilayah Transnistria dan Bessarabia disatukan oleh Pemerintah Uni Soviet menjadi sebuah negara satellite baru yang diberi nama Moldova. Penyatuan secara paksa inilah kemudian menyebabkan kedua belah pihak mengalami krisis identitas, sehingga konflik masih terus terjadi hingga saat ini (Malling, 2015).

Permasalahan diantara kedua belah pihak terus terjadi, khususnya pada awal masa kemerdekaan Moldova. Permasalahan ini mengalami eskalasi pada tahun 1992, dimana perang saudara terjadi sehingga menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Perang saudara ini berakhir dengan gencatan senjata yang masih belum diterapkan efektif hingga saat ini. Oleh karena itu, misi yang dilakukan OSCE sejak tahun 1992 untuk menyelesaikan konflik Transnistria masih berlangsung hingga saat ini, dimana upaya penyelesaian masih terus dilakukan dalam konflik yang terjadi di wilayah Moldova tersebut. Keterlibatan OSCE dalam konflik Transnistria didasarkan pada mandate yang disetujui oleh 57 negara anggota. Sejak tahun 1992 hingga saat ini, OSCE berusaha untuk melakukan pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik, menjadi penengah, dan melindungi Moldova dari segala aspek kenegaraan, seperti memperkuat kedaulatan, dan integritas wilayah Moldova yang sesuai dengan hukum internasional yang berlaku (OSCE, 2020).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah “Bagaimana upaya *Organization for*

*Security and Cooperation in Europe* (OSCE) dalam membantu menangani konflik yang terjadi di Transnistria?”

## 2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

### 2.1 Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan salah satu aktor penting dalam konteks hubungan internasional kontemporer. Banyak sekali ahli ataupun praktisi HI yang memberikan definisi mengenai pengertian dari Organisasi Internasional, salah satunya ialah yang dijelaskan oleh Pierre Gerbert yang mana beliau mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai

*“The idea of an international organization is the outcome of an attempt to bring order into international relations by establishing lasting bonds across frontiers between governments or social groups wishing to defend their common interests, within the context of permanent bodies, distinct from national institutions, having their own individual characteristics, capable of expressing their own will and whose role it is to perform certain functions of international importance”* (Archer, 2001).

Selain itu pula, Dr. Boer Mauna menjelaskan bahwa, Organisasi Internasional merupakan sebuah badan yang terdiri dari himpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat, bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui perhimpunan itu sendiri. Sebagai badan yang berfungsi untuk bekerjasama dan memfasilitasi kepentingan masing-masing anggotanya, organisasi internasional memiliki peranan penting dalam HI Kontemporer. Keberadaan dan eksistensi dari Organisasi Internasional

dapat dijadikan sebagai jembatan bagi negara-negara anggotanya untuk berdialog, sehingga menimbulkan fungsi komunikasi yang kompleks sebagai wadah artikulasi kepentingan serta dapat memudahkan akses bagi upaya penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, baik konflik internal maupun eksternal (Sugito, 2016).

Lebih lanjut, Harold K. Jacobson menjelaskan bahwa dalam Organisasi Internasional terdapat beberapa konsep yang menjadi dasar dari pembentukannya. Yakni, *Collective Security* dan *Disarmament and Arms Control*. Pada konsep ini menjelaskan bahwa Organisasi Internasional dibentuk dengan dasar keamanan bersama, dimana negara-negara anggota bahu-membahu untuk bekerjasama dalam mewujudkan perdamaian, baik dari sisi internal maupun eksternal. Negara-negara anggota juga melakukan control terhadap persenjataan, sehingga penggunaan alatsista militer hanya digunakan dengan tujuan yang tepat dan lebih condong kearah pertahanan diri (Jacobson, 1979).

Selain itu, berdasarkan pada Karen Mingst, pada tingkatan internasional, Organisasi Internasional memiliki beberapa fungsi utama (Mingst, 1999), yakni:

1. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama antar negara/aktor,
2. Menyediakan informasi dan pengawasan,
3. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik,
4. Mengkoordinir aktifitas internasional mengenai permasalahan bersama,
5. Menyediakan arena untuk bargaining bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah,
6. Membentuk rezim internasional.

Organisasi internasional juga memiliki fungsi lainnya (Jacobson, 1979), yakni:

1. *Fungsi Informasi*, dari sisi informasi, Organisasi Internasional memiliki keharusan untuk melakukan pertukaran informasi, pengumpulan data, Analisa, dan berbagai macam hal yang bersifat informasi yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan dari masing-masing negara anggota.
2. *Fungsi Normatif*, Fungsi normatif kurang lebih bisa dikatakan sebagai pembuatan rezim internasional yang harus ditaati oleh negara-negara anggotanya. Rezim yang dimaksud ialah penentuan norma dan standar (sikap) yang berlaku bagi negara-negara anggotanya.
3. *Fungsi Pembuat Peraturan*, Sebagai sebuah instrument yang diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan dari para anggotanya, Organisasi Internasional harus memiliki peraturan dan hukum yang bersifat legal dan mengikat. Hal ini dibutuhkan demi terwujudnya situasi yang teratur dan sesuai dengan tata cara yang berlaku, serta telah ditetapkan ataupun disepakati secara bersama-sama.
4. *Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan*, Organisasi Internasional juga memiliki fungsi sebagai badan pengawas, hal ini dibutuhkan demi terwujudnya program yang akan jalankan maupun yang sudah dijalankan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku.

5. Fungsi Operasional, Dari sisi operasional Organisasi Internasional memiliki kewenangan untuk menggunakan sumber daya organisasi. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya militer, ataupun keuangan.

### 3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah qualitative yang berfokus pada teknik *library research* atau teknik kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data valid yang berasal dari data sekunder, dan berasal dari sumber kepustakaan. Data kepustakaan berasal dari buku, surat kabar, jurnal, dan sumber cetak lainnya. Selain itu, sumber data lain yang berasal dari internet juga digunakan untuk memperkuat penelitian, seperti website resmi, tagar, situs, dan sumber-sumber internet lainnya yang memiliki data kredibel.

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis data yang bersifat induktif. Penulis akan berusaha untuk memahami fakta-fakta yang didapatkan yang berkaitan dengan objek analisa. Setelah itu, fakta-fakta ini akan diubah menjadi generalisasi empiris dan selanjutnya akan dilakukan perumusan masalah, preposisi, dan diubah menjadi sebuah naskah tulisan yang baik dan mudah dimengerti.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

#### a. Sejarah dan Latar Belakang OSCE

Awal mula berdirinya OSCE dimulai pada pertengahan tahun 1973, tepatnya pada bulan Juli 1973. Pada saat itu 33 Menteri Luar Negeri dari Eropa dan Amerika Serikat sepakat untuk mengadakan Konferensi dibidang kerjasama keamanan, politik, ekonomi, dan berbagai macam isu-isu penting lainnya. Konferensi ini selanjutnya diberi Nama Conference of Security and Cooperation in Europe (CSCE). Terbentuknya CSCE inilah yang selanjutnya menjadi awal mula dari berdirinya OSCE yang saat ini kita kenal sebagai organisasi kerjasama terbesar di Bidang Keamanan dan Pertahanan (CSCE, 2021).

CSCE sendiri sejak awal memang difokuskan untuk menangani permasalahan yang timbul akibat adanya perang dingin. Konferensi ini dibangun untuk membangun dialog diantara kedua Blok yang pada saat itu sedang berseteru, CSCE sendiri menjalankan dua buah konferensi, yang menghasilkan sebuah pakta yang berisi mengenai perjanjian dan kesepahaman bersama dalam ranah politik-militer, ekonomi-lingkungan hidup, dan permasalahan hak asasi manusia, yang kemudian dikenal dengan nama Helsinki Process. Pakta ini berusaha untuk mempromosikan keamanan dan perdamaian diantara kedua Blok yang berseteru, sehingga diharapkan dapat terwujudnya kestabilan dan terpeliharanya keamanan dikawasan Euro-Atlantik (Beqiraj, 2011).

Pasca perang dingin, para anggota dari CSCE menganggap bahwa tugas dari Konferensi bersama ini sudah selesai. Namun banyak dari anggotanya yang menganggap bahwa CSCE harus diteruskan, dan memperluas ranah kerjasama kedalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan ataupun isu-isu yang bersifat kontemporer. Berdasarkan pada hal inilah, negara-negara anggota CSCE sepakat untuk membentuk sebuah organisasi baru yang tidak hanya berfokus pada permasalahan tradisional seperti pertahanan keamanan, melainkan juga fokus pada permasalahan yang Akan timbul pasca adanya perang dingin. Kesehaphahaman untuk membentuk organisasi baru ini terucap pada KTT Helsinki 1992, dan pada akhirnya diresmikan secara sah pada KTT yang dilaksanakan di Kota Budapest, Hungary 1994. Organisasi baru tersebut kemudian secara luas dikenal dengan Nama Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) (Giovani, 2004).

#### b. Sistem Keanggotaan

Pasca berubah bentuk dari yang sebelumnya hanya berupa kelompok konferensi menjadi sebuah organisasi, OSCE tentunya memiliki sistem keanggotaan yang lebih kompleks dibandingkan dengan CSCE. OSCE sendiri saat ini memiliki dua buah sistem keanggotaan, yakni Negara Peserta dan Mitra Kerjasama. Pada saat ini OSCE memiliki 57 negara anggota, yang tersebar dalam beberapa region, seperti Eropa, Amerika Utara, dan juga Asia. Yang mana Albania merupakan negara pertama yang bergabung pada Juni, 1991 dan Mongolia

sebagai negara yang paling terakhir bergabung, yakni pada November 2012 (OSCE, 2021). Tingginya tingkat keberagaman dalam keanggotaan OSCE menjadikan OSCE didaulat sebagai Organisasi Kerjasama Keamanan terbesar di Dunia.

Pada bidang mitra kerjasama, OSCE memiliki mitra kerjasama yang tersebar dalam berbagai wilayah. Mitra kerjasama yang dimiliki oleh OSCE dibagi menjadi dua kategori, yakni Mitra Kerjasama Asia dan Mitra Kerjasama Meditterania. Meskipun dialog OSCE dengan Mitra Kerjasama mencakup seluruh kegiatan Organisasi, namun, setiap kelompok Mitra yang terlibat secara kooperatif terbagi dalam isu-isu spesifik yang menjadi kepentingan bersama.

Mitra Mediterania secara khusus berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan anti-terorisme, keamanan perbatasan, pengelolaan air, tantangan keamanan lingkungan, manajemen migrasi, dialog antarbudaya dan antaragama, toleransi dan non-diskriminasi. Sedangkan Mitra Kerja Sama Asia berfokus pada pendekatan komprehensif OSCE terhadap isu keamanan dan langkah-langkah pembangunan kepercayaan dan keamanan sebagai sumber inspirasi yang mungkin bias diterapkan pada wilayah mereka sendiri. Mitra Asia juga fokus dalam kegiatan berbagi pengalaman dalam menanggapi ancaman transnasional, mengelola perbatasan, menangani masalah transportasi, memerangi perdagangan manusia, membangun institusi demokrasi dan menyelenggarakan pemilihan umum (OSCE, 2021).

#### c. Struktur Organisasi dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Berdasarkan pada informasi yang tertera pada website resmi OSCE, struktur utama dari Organisasi ini terdiri dari beberapa bagian, yakni, Decision Making Bodies, Executive Structure, OSCE in the Field, dan OSCE-related Bodies (OSCE, 2021).

### 1. *Decision Making Bodies*

Dalam proses pengambilan keputusan, OSCE memiliki Parlemen yang disebut sebagai Parliamentary Assembly (PA) dan Perwakilan Personal yang disebut Personal Representative of the Chairperson in-Office (OSCE, 2021). Parliamentary Assembly (PA) sendiri merupakan sebuah parlemen yang dimiliki oleh OSCE yang mana didalamnya terdapat lebih dari 300 anggota parlemen. PA digunakan sebagai forum untuk melakukan diplomasi, memperkuat kerjasama internasional, dan menegakkan komitmen pada penyelesaian isu-isu politik, ekonomi, keamanan, dan Hak Asasi Manusia. PA juga difungsikan sebagai bagian yang bertugas untuk mengembangkan dan mempromosikan mekanisme pencegahan serta penyelesaian konflik di negara anggota.

Sementara itu, Personal Representative of the Chairperson in-Office merupakan sekelompok perwakilan yang dipilih oleh ketua dan ditugaskan untuk membantu menyelesaikan konflik di wilayah negara-negara anggota. Para Personal Representative bertugas untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu spesifik, seperti isu gender, toleransi terhadap minoritas, rasisme, dan berbagai macam isu-isu yang bersifat low politics lainnya.

### 2. *Executive Structures*

Dibawah badan pengambil keputusan, OSCE memiliki Executive Structures yang bertugas untuk

menjalankan fungsi OSCE sebagai sebuah organisasi (OSCE, 2021).

Dalam Executive Structures terdapat Sekretaris Jenderal, yang dipilih dalam kurun waktu tiga tahun sekali oleh Ministerial Council. Sekretaris Jenderal bertugas untuk memimpin Sekretariat OSCE di Wina, Austria. Sekretaris Jenderal bertugas untuk memimpin jabatan fungsional dan operasional selama tiga tahun, dan berfungsi untuk menjadi jembatan antara OSCE dan Negara Anggota.

Selanjutnya, OSCE memiliki Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). ODIHR bermarkas di Warsawa, Polandia dan memiliki tugas untuk memberikan bantuan, dukungan, dan pengetahuan kepada Negara Anggota, terkait dengan permasalahan ataupun kepentingan dibidang Demokrasi, Pemilihan Umum, Hak Asasi Manusia, dan Non-diskriminasi.

### 3. *OSCE-related Bodies*

Selain bergantung pada struktur inti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. OSCE juga bekerja bersama dengan badan-badan terkait yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional-nya. Badan-badan terkait ini dibagi menjadi 3 jenis, yakni Joint Consultative Group, Open Skies Consultative Commission, Court of Consultation and Arbitration.

Joint Consultative Group bermarkas pusat di Wina, Austria. Badan ini memiliki tugas untuk membahas perihal ketentuan ataupun hukum yang berkaitan dengan persenjataan militer di Kawasan Eropa. Open Skies Consultative Commission, Badan ini juga bermarkas di Wina, Austria dan merupakan bagian dari pertemuan rutin yang dilakukan oleh 34 negara anggota OSCE yang menandatangani Open Skies

Treaty. Badan terakhir ialah Court of Consultation and Arbitration, yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa, dan membantu membuat resolusi dari konflik yang sedang terjadi (OSCE, 2021).

#### 4. Mekanisme Pendanaan

Sama seperti organisasi pada umumnya, suatu Organisasi Internasional tentunya membutuhkan Dana untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. OSCE sendiri memiliki mekanisme pendanaan yang tidak jauh berbeda dengan Organisasi Internasional lainnya, yakni melalui sokongan atau iuran dari negara-negara anggotanya. Hal ini memiliki arti bahwa 57 negara anggota OSCE memberikan sokongan Dana, bagi proses operasional berjalannya organisasi. Berdasarkan pada update terakhir di tahun 2019, OSCE Permanent Council menyatakan bahwa OSCE memiliki total Dana Anggaran sebesar EUR 138,204,100 (OSCE, 2019).

Anggaran Dana yang besar ini digunakan untuk menjalankan tugas operasional OSCE sehari-hari. Hal ini juga dikarenakan OSCE memiliki banyak sekali staff, dengan lebih dari 550 staff yang bekerja di Kantor Pusat, dan lebih dari 2.330 staff yang bekerja di lapangan. Hal ini belum termasuk dengan karyawan kontrak, dan berbagai macam rekrutmen tambahan sesuai dengan kebutuhan dari OSCE sendiri, karena pada setiap kasus memiliki kebutuhan akan jumlah tenaga tambahan yang berbeda-beda (OSCE, 2019).

##### a. Misi OSCE

Konsep misi yang dijalankan oleh OSCE sebagian besar merupakan misi lapangan, yang mana staff ataupun badan OSCE yang ditugaskan akan langsung terjun ke tempat terjadinya konflik. Misi lapangan seringkali dipilih oleh OSCE

karena dianggap dapat efektif untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi, selain itu OSCE juga akan dapat lebih memahami situasi karena memang dapat bersentuhan secara langsung dengan konflik yang terjadi di lapangan. Dengan adanya Misi Lapangan, OSCE juga dapat membantu untuk mempercepat proses pembangunan pasca konflik, dan membantu masyarakat yang terdampak konflik.

Sampai saat ini, Misi Lapangan OSCE dibagi kedalam beberapa region atau kawasan. Yakni, Kawasan South-eastern Europe, Eastern Europe, South Caucasus, Central Asia. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa melihat pada gambar bagan misi diatas, yang mana berisi misi-misi yang sudah dilaksanakan OSCE sampai dengan saat ini (OSCE, 2021).

#### 4.2 Konflik Transnistria

##### a. Sejarah dan Latar Belakang Konflik

Orang-orang berbahasa Rumania benar-benar menghormati asal etnis mereka. Pemerintah pusat Moldova membuat Tiraspol khawatir tentang kesenjangan di wilayah kanan Moldova karena karena lebih dari 65% penduduknya adalah etnis Rumania. Parlemen Moldova mengesahkan undang-undang tentang penggunaan bahasa pada bulan Agustus dan September 1989. Undang-undang tersebut mengatur diskriminasi linguistik terhadap minoritas di Transnistria. Pekerja transnistrian dan mahasiswa merasakan diskriminasi langsung. Pekerja tidak dapat melamar pekerjaan di ibukota Chisinau karena kendala bahasa dan siswa tidak dapat memasuki universitas di wilayah ibukota (Cocojaru, 2006).

Alasan Transnistria mempertahankan bahasa Sirilik adalah penolakan untuk menyatukan Moldova dengan Rumania.

Alasan lainnya adalah untuk mempertahankan mahasiswa internasional di Tiraspol. Ada 10.000 mahasiswa dan 2.000 profesor di berbagai universitas berbahasa Rusia di Tiraspol. Pada 11 Agustus 1989, Tiraspol menunjuk seorang anggota dewan untuk menentang undang-undang diskriminasi di Moldova. Dewan itu disebut "Dewan Kolektif Buruh Bersatu" (OSTK Ob'edinennyi Sovet Trudovoykh Kollektivov). Anggota dewan ini menyerukan kesepakatan khusus tentang bahasa dan otonomi daerah, terutama di kawasan industri Transnistria. OSTK tidak hanya menyerukan kesepakatan khusus, tetapi penduduk Transnistria juga berdemonstrasi dan melakukan pemogokan pada akhir tahun 1989 (Andersen, 2014).

#### b. Konflik Senjata Moldova-Separatis Transnistria

Kemenangan Dewan Persatuan Perguruan Tinggi Buruh (OSTK) dalam pemungutan suara tentang otonomi khusus disambut baik oleh gerakan separatis Transnistria sebagai jalan menuju kemerdekaan Transnistria dari Pemerintah Moldova. Tidak puas dengan otonomi khususnya, Smirnov mendeklarasikan kemerdekaannya pada 19 Agustus 1990. Beberapa kota di Transnistria sendiri langsung beramai-ramai mengibarkan bendera Soviet dengan warna merah dengan lambang palu dan arit (Edinsky).

Sebelumnya, kelompok separatis mengganti pemimpin daerah Transnistria dengan kebebasan politik sesuai dengan hukum internasional. Smirnov menggantikan para pemimpin pro-Moldova dengan pemimpin Pridnestrovskaja Moldavskaia Respublika. Menghadapi tindakan ini, Moldova menolak untuk menyatakan bagian dari

wilayahnya dan pada 27 Agustus 1991 wilayahnya akan melakukan kudeta terhadap Transnistria (Andersen, 2014).

Dari tahun 1990 hingga 1992 dilakukan konsolidasi politik untuk memperkecil wilayah antara kedua belah pihak. 88 Namun, konflik ini meningkat ketika tentara Moldova mencapai bagian perbatasan Transnistria Dniester pada tahun 1992.<sup>89</sup> Pada saat itu, pemerintah Moldova mengumumkan keadaan darurat dan memerintahkan serangan militer ke Transnistria.

Moldova sebelumnya mampu merebut kekuasaan militer di Tiraspol dengan menghilangkan pengaruh Pridnestrovskaja Moldavskaia Respublika pada penduduk Tiraspol. Pada tanggal 3 Desember 1991 Transnistria menunjuk panglima tertingginya, Mayor Jenderal Gennady Jakowlew, sebagai kepala pertahanan untuk Pridnestrovskaja Moldavskaia Respublika. Mayor Jenderal Yakovlev adalah panglima tertinggi Uni Soviet yang memimpin taktik senjata nuklir selama Perang Dingin. Dengan Jakowlew, Pridnestrovskaja Moldavskaia Respublika memiliki wewenang untuk mengontrol divisi infanteri selama kegiatan militer di Transnistria (Jackson, 2004).

Moldova mulai menunjukkan konflik bersenjata ketika merebut wilayah Tighinia. Transnistria membalas serangan Moldavia dengan menghancurkan jembatan strategis di Dubosari dan Coshnitia. Aksi militer ini terjadi di daerah padat penduduk. Hal ini menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan bangunan di kawasan perbatasan. 280 orang meninggal, 300 orang hilang dan 532 orang luka berat. Kedua belah pihak tidak menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang muncul sebelumnya. Partai Transnistria, yang diwakili oleh Presiden Rusia Boris Yeltsin,

menyepakati gencatan senjata dan perjanjian damai pada 21 Juli 1992. Namun, Moldova hanya menyetujui gencatan senjata antara kedua pihak. Beberapa kota dan aktivis di Moldova menolak untuk meratifikasi perjanjian damai yang diusulkan oleh perwakilan Transnistria (Savceac, 2014).

#### **4.3 Peran Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)**

Langkah utama yang dilakukan oleh OSCE pada misi ini ialah dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai jalannya konflik dari Security Zone yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya ini disesuaikan dengan Mandat OSCE yang sebelumnya sudah disepakati melalui Joint Control Commission (JCC). Segala macam temuan misi akan diolah dan dianalisis, lalu setelahnya akan dibagikan kepada delegasi JCC, OSCE, dan negara-negara yang terlibat konflik (Lungu, 2007).

OSCE beroperasi pada konsep keamanan yang komprehensif, yang mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu sebagai landasan untuk menjalankan misi di Security Zone. Sesuai dengan mandatnya, OSCE memberikan nasihat dan bantuan tenaga ahli untuk membantu mempromosikan mengenai ketaatan terhadap kewajiban dan komitmen internasional dalam hak asasi manusia dan non-diskriminasi terhadap minoritas (Lungu, 2007).

Selain itu, OSCE juga berkomitmen untuk memberikan transparansi bagi segala proses yang akan dilakukan, khususnya bagi kedua belah pihak yang bertikai. OSCE juga berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tanpa menggunakan konflik senjata, yang mana ditunjukkan dengan cara menghalau

pangkalan militer dari pasukan Rusia, yang ditakutkan akan memberikan dampak buruk bagi konflik yang sedang berlangsung (OSCE, 2020).

OSCE menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional sesuai dengan konsep yang sudah dijalankan diatas. Hal ini sesuai dengan mandate OSCE yang dikeluarkan pada 4 Februari, 1993. Yang berisi:

*1. facilitate the establishment of a comprehensive political framework for dialogue and negotiations and assist the parties to the conflict in pursuing negotiations on a lasting political settlement of the conflict, consolidating the independence and sovereignty of the Republic of Moldova along with an understanding about a special status for the Transnistria region;*

*2. gather and provide information on the situation, including the military situation, in the region, investigate specific incidents and assess their political implications;*

*3. encourage the participating States concerned in pursuing negotiations on an agreement on the status and the early, orderly and complete withdrawal of foreign troops;*

*4. provide advice and expertise, as well as a framework for other contributions, on such parts of a political settlement as effective observance of international obligations and commitments regarding human and minority rights, democratic transformation, repatriation of refugees, definition of a special status of the Trans-Dniester region; initiate a visible OSCE presence in the region and establish contacts with all parties to the conflict, local authorities and local populations*

##### a. Peran dan Resolusi Konflik OSCE

OSCE memiliki kontribusi dan perang yang sangat besar dalam proses penyelesaian konflik antara Transnistria dan Moldova. Hal ini dikarenakan konflik yang terjadi diantara Transnistria dan Moldova mulai mengalami penurunan intensitas ketika OSCE turut andil dalam proses perdamaian diantara kedua belah pihak. Berikut merupakan upaya dan peran yang telah dilakukan OSCE di Transnistria:

#### 1. Pertemuan Informal Format 5+2

Pertemuan Format 5+2 merupakan pertemuan informal yang ditujukan untuk mempertemukan pihak yang berkonflik, bersama dengan mediator dan pengawas negosiasi. Pertemuan ini dinamakan sebagai Pertemuan 5+2, karena pada proses negosiasi dan mediasi, pertemuan informal yang dilaksanakan OSCE ini menggunakan format 5+2. Angka 5 menandakan pihak yang terlibat dalam konflik, yakni Transnistria, Moldova, Rusia, Ukraina, dan OSCE sebagai moderator sekaligus mediator diantara negara-negara tersebut. Sementara 2, menggambarkan jumlah pengamat atau observer yang mana pada kasus ini wewenang sebagai observer diberikan kepada Amerika Serikat dan Uni Eropa (OSCE Factsheet, 2019).

Sejak diadakannya Pertemuan 5+2, progress penyelesaian konflik telah berkembang pesat. Pada tahun 2012, pembukaan kembali jalur kereta api Chisinau-Tiraspol menjadi langkah nyata untuk menyelesaikan masalah tersebut. Transnistria masih menginginkan kebebasan *de facto* untuk mencapai kekuasaan tertinggi sebagai sebuah negara (OSCE Factsheet, 2019).

Sejak pertemuan 5+2 di Berlin yang dilaksanakan pada tahun 2016, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengerjakan delapan langkah membangun kepercayaan, yang mana kesepakatan ini membentuk

paket “Berlin-plus”. Hingga hari ini, Transnistria dan Moldova telah mencatat pencapaian besar pada enam kesepakatan, yang telah berhasil meningkatkan kehidupan sehari-hari bagi siswa, guru, petani, pengusaha, dan berbagai macam elemen masyarakat lainnya di kedua wilayah. Kemajuan substansial telah dicapai dalam pelaksanaan perjanjian telekomunikasi.

Pertemuan 5+2 ini masih tetap secara rutin dilaksanakan oleh OSCE hingga tahun 2019 lalu. Pertemuan ini diadakan setiap tahunnya demi mencegah konflik besar seperti yang terjadi pada tahun 1992 terulang kembali. Pertemuan berkala ini dilaksanakan juga sebagai sarana monitoring bagi OSCE, karena dari pertemuan ini OSCE dan Negara-negara yang terlibat dapat melihat sejauh mana perkembangan resolusi konflik yang telah dilakukan.

#### 2. Moldova Action Plan (MAP)

Dari Pertemuan diatas 5+2, OSCE juga membuat sebuah road map, yang bernama Moldova Action Plan (MAP). MAP sendiri merupakan rancangan yang memiliki pengaruh lebih luas ke kalangan masyarakat bawah. MAP memberikan wadah bagi masyarakat sipil untuk terlibat langsung dalam proses perdamaian yang berusaha diwujudkan di Transnistria-Moldova. MAP sendiri mewajibkan masyarakat sipil untuk mulai menghargai perbedaan, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap orang-orang Transnistria (Litra, 2010).

Selain itu, baru-baru ini Council of Europe atau Dewan Eropa melakukan adopsi Moldova Action Plan (MAP) untuk pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan 2024. Adopsi ini ditujukan untuk pembaharuan Undang-undang, Institusi, dan Praktik penerapan hukum di Moldova

agar sesuai dengan standar Eropa dibidang HAM, Supremasi Hukum, dan Demokrasi (Council of Europe, 2020).

Rencana aksi bertujuan untuk membangun pekerjaan yang telah dilakukan di berbagai bidang rencana aksi sebelumnya. Ini termasuk menyelaraskan undang-undang dan praktik nasional dengan standar Eropa anti-diskriminasi dan kesetaraan gender, memperkuat kerangka perlindungan anak nasional untuk memerangi eksploitasi seksual dan pelecehan anak, meningkatkan independensi dan akuntabilitas sistem peradilan, dan meningkatkan undang-undang dan praktik pemilu (Council of Europe, 2020).

Langkah-langkah untuk membangun kepercayaan di antara komunitas-komunitas yang terpecah akan terus berlanjut, dengan fokus pada peningkatan dialog dan hak asasi manusia di wilayah tersebut, dalam konsistensi penuh dengan kebijakan otoritas Moldova mengenai masalah tersebut.

### 3. Membangun Kepercayaan dan Mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM)

Misi OSCE yang diwujudkan melalui Program Hak Asasi Manusia, berusaha untuk mendukung upaya pembangunan kepercayaan yang membentang di kedua tepi Sungai Dniester/Nistru. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan masyarakat sipil Transnistria dan Moldova, misi ini berfokus pada penyelenggaraan inisiatif, dan pengembangan kapasitas bagi para profesional hukum dan masyarakat sipil di kedua pihak, khususnya tentang masalah Hak Asasi Manusia (OSCE Factsheet, 2019).

Isu-isu ini diprioritaskan oleh Kelompok Kerja Ahli sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik seperti

kebebasan untuk bergerak, memperoleh dokumen status sipil (kewarganegaraan), memerangi perdagangan manusia, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta Hak Asasi yang berkaitan dengan Hak-hak yang harus diperoleh sebagai warga negara, seperti pemilu, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Misi ini juga mendukung upaya Pemerintah Moldova untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif dan toleran, dan melindungi hak-hak minoritas nasional. Ini adalah prasyarat penting untuk penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan (OSCE Factsheet, 2019).

### 4. Operasionalisasi OSCE pada Konflik Transnistria

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi informasi, OSCE terus berupaya untuk melakukan pengumpulan data dan Analisa data supaya dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik.

Pada Konflik Transnistria OSCE terus berupaya untuk melakukan berbagai macam cara demi menjaga perdamaian yang ada di wilayah Transnistria. Salah satu bentuk upaya ini ialah dengan mengeluarkan kesepakatan dimana kesepakatan itu dikenal dengan “Berlin-plus” (OSCE, 2016).

Sampai pada hari ini kesepakatan “Berlin-Plus” sudah memberikan berbagai macam dampak positif bagi masyarakat Transnistria, khususnya yang berada pada kalangan pelajar, guru, petani, pengusaha, dan kalangan masyarakat lainnya yang berada diantara Sungai Dniester/Nistru River.

Sesuai dengan apa yang tertera pada gambar diatas, kita bisa melihat bahwa OSCE telah melakukan 8 pencapaian besar di Transnistria, yakni:

- 1) Membuka kembali jembatan yang berlokasi diantara Desa Gura Bichui dan Desa Bychok;
- 2) Membangun kepercayaan melalui Universitas-universitas yang ada di Transnistria.
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Transnistria, dengan menggunakan tulisan latin sebagai salah satu metode mengajar;
- 4) Meningkatkan akses ke wilayah perkebunan atau pertanian bagi masyarakat Moldova dan Transnistria.
- 5) Membangun jalan yang dapat meningkatkan akses bagi internasional dikawasan Transnistria.
- 6) Meningkatkan kelestarian ekologi;
- 7) Meningkatkan sistem telekomunikasi;
- 8) Dan yang terakhir ialah, mengurangi tindak kriminal dan meningkatkan kebebasan berpendapat.

Hal inilah yang dapat membuktikan bahwa OSCE benar-benar beroperasi dan berusaha semaksimal mungkin pada Konflik Transnistria. Meskipun belum bisa serratus persen menghilangkan konflik yang ada, namun paling tidak OSCE sudah berusaha keras untuk terus memberikan progress yang baik bagi masyarakat Transnistria dan Moldova.

OSCE memiliki komitmen yang sangat serius untuk membantu menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian diantara Transnistria dan Moldova. OSCE tidak segan-segan mengeluarkan dana yang cukup banyak demi membantu menyelesaikan konflik ini. Terhitung

sampai tahun 2019, OSCE sudah menghabiskan dana sebesar EUR 2,302,700 anggaran utama, dan lebih dari EUR 400,000 anggaran tambahan. Misi ini juga dilaksanakan dengan baik oleh 52 staff, yang terdiri dari 13 Staff Internasional, dan 39 Staff Lokal.

Melihat penjelasan diatas, kita bisa melihat bahwa OSCE memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan perdamaian di Transnistria. Perjuangan OSCE sejak tahun 1992 hingga 2019 telah berhasil memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Meskipun hingga saat ini gesekan-gesekan kecil masih beberapa kali terjadi, namun hal ini tidak terlalu berdampak karena OSCE berhasil melakukan pembangunan pasca perang, yang mana hal ini berhasil mencegah konflik besar terjadi lagi sampai hari ini.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Konflik yang bersifat separatisme atau usaha-usaha untuk memerdekakan diri dari suatu negara adalah hal yang sudah seringkali terjadi, baik di masa lampau maupun di era modern seperti sekarang. Tidak dapat kita pungkiri bahwa terkadang Negara yang terlibat konflik seringkali kesulitan, atau bahkan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Oleh karenanya, Peran dan bantuan dari Organisasi Internasional bisa menjadi sesuatu yang sangat penting bagi sebuah negara.

Seperti yang terjadi pada konflik yang terjadi di Transnistria kali ini. Moldova yang merupakan negara utama, gagal dan tidak mampu menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara dirinya dan Transnistria. Melihat ketidakmampuan ini, Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) datang sebagai

Organisasi Internasional yang berupaya membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara keduanya.

Konflik Transnistria sendiri merupakan konflik yang sejatinya terjadi sudah sejak lama, namun baru mulai muncul ke permukaan setelah Uni Soviet mengalami keruntuhan pada dekade 90-an. Konflik ini didasarkan pada perbedaan etnis, bahasa, dan budaya yang terjadi diantara Moldova dan orang-orang Transnistria. Perbedaan ini menimbulkan berbagai macam masalah, seperti diskriminasi, pembatasan hak-hak sosial, dan hilangnya hak kewarganegaraan bagi masyarakat Transnistria. Atas dasar pada perbedaan inilah Transnistria melakukan pemberontakan dan berusaha untuk mendirikan negaranya sendiri.

OSCE sendiri memiliki peran yang cukup signifikan pada konflik ini. Dimana OSCE sebagai pihak netral berhasil untuk menghentikan intensitas kerusuhan dan konflik diantara kedua belah pihak. OSCE melakukan hal ini dengan beberapa cara, yakni dengan Pertemuan 5+2, yang didalamnya terdapat Transnistria, Moldova, Ukraina, Rusia sebagai pihak yang terlibat, dan OSCE sebagai pihak netral, serta 2 observer yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa. Selain itu, OSCE juga terus mempromosikan dan berupaya membangun kesadaran akan Hak Asasi Manusia. Yang mana kesadaran akan pentingnya menghargai sesama dianggap akan mampu menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian diantara Pemerintah Moldova, dan Transnistria, serta masyarakat sipil di kedua belah pihak.

## Daftar Pustaka

### *Acuan dari buku:*

- Archer, C. 2001. *International Organizations*. London: Routledge.
- Beqiraj, J. 2011. *The Democratization of International*. International Democracy Watch.
- Edinsky, A. (n.d.). *The Dniester Conflict*. 979.
- Galbreath, D. J. 2007. *The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)*. New York: Routledge.
- Giovani, B. 2004. *Sicurezza e cooperazione da Vancouver*. Torino: Giappicheli.
- Jackson, N. J. 2004. *CIS Theories, Debate, and Actions*. New York: Routledge.
- Jacobson, H. K. 1979. *Network of Interdependence: International Organization and the Global Political System*. New York: Alfred A. Knoph.
- Mingst, K. A. 1999. *Essentials of international relations*. W.W. Norton & Company.

### *Acuan artikel dalam jurnal:*

- Cocojaru, N. 2006. Nationalism and Identity in Transnistria. *The European Journal of Social Research*.
- Kolsto, P. 1980. *The Transnitrian Republic. Nationalities Paper*.
- Litra, N. P. 2010. *Transnistria: a bottom-up Solution*. 6.
- Lungu, A. 2007. *Peaceful Conflict Transformation in Transnistria. Austria: European University Centre for Peace Studies*, 21.

Munteanu, I. 2010. Political Review and Parties Recommendations Legislation for Reform in Moldova. *OSCE*, 210.

***Acuan artikel dalam website:***

Andersen, A. 2014. The Conflict in Transnistria: National Consensus is a Long Way off. *America Journal*: [http://www.conflicts.rem33.com/images/moldova/nistru\\_konflikt.htm](http://www.conflicts.rem33.com/images/moldova/nistru_konflikt.htm)

Council of Europe. 2020.. Council of Europe adopts new Action Plan for the Republic of Moldova. Council of Europe: <https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-adopts-new-action-plan-for-the-republic-of-moldova>

Council of Europe. 2020. Council of Europe adopts new Action Plan for the Republic of Moldova. Council of Europe: <https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-adopts-new-action-plan-for-the-republic-of-moldova>

CSCE. 2021. Our History. CSCE: <https://www.csce.gov/about-csce/our-history>

Gazeta, R. 2014. Satu Lagi Wilayah yang Ingin Bergabung dengan Rusia. *Russia Beyond*: [https://id.rbth.com/politics/2014/04/10/satu\\_lagi\\_wilayah\\_yang\\_ingin\\_bergabung\\_dengan\\_rusia\\_23571](https://id.rbth.com/politics/2014/04/10/satu_lagi_wilayah_yang_ingin_bergabung_dengan_rusia_23571)

Gonta, V. 2014. New Transnistria talks end with timid outcomes and big hopes. *Moldova.org*: <https://www.moldova.org/en/new-transnistria-talks-end-with-timid-outcomes-and-big-hopes/>

Malling, J. 2015. The value of a frozen conflict. *Le Monde Diplomatique*: <https://mondediplo.com/2015/03/04/transnistria>

Minority Rights Group International. 2007. World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Transnistria (unrecognised state). *Minority Rights Group International*: <https://www.refworld.org/docid/4954ce57c.html>

OSCE. 2016. Mission to Moldova. OSCE: <https://www.osce.org/mission-to-moldova/391502>

OSCE. 2019. Funding and Budgeting. OSCE: <https://www.osce.org/funding-and-budget>

OSCE. 2020. OSCE Mision to Moldova. OSCE: <https://www.osce.org/mission-to-moldova>

OSCE. 2020. *OSCE Mission to Moldova*. OSCE: <https://www.osce.org/mission-to-moldova>

OSCE. 2020. What is the OSCE? OSCE: <https://www.osce.org/whatistheosce>

OSCE. 2020. What we do? OSCE: <https://www.osce.org/what-we-do>

OSCE. 2020. Who we are. OSCE: <https://www.osce.org/who-we-are>

OSCE. 2021. Decision Making Bodies. OSCE: <https://www.osce.org/whatistheosce#how>

OSCE. 2021. Executive Structures. R OSCE: <https://www.osce.org/whatistheosce#how>

OSCE. 2021. *How We Work*. OSCE:  
<https://www.osce.org/whatistheosce#how>

OSCE. 2021. *OSCE in the Field*. OSCE:  
<https://www.osce.org/whatistheosce#how>

OSCE. 2021. *Participating States*. OSCE:  
<https://www.osce.org/whatistheosce#how>